



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JDIH PEMERINTAH DAERAH

SRI PURWANINGSIH , SH, MAP  
Plh. Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum  
dan Kesatuan Bangsa

JAKARTA

12 SEPTEMBER 2023



# 5 PRIORITAS KERJA JOKOWI-MA'RUF

Pelantikan Presiden & Wakil Presiden RI  
Periode 2019-2024

“**Pertama**, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. **Kedua**, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. **Ketiga**, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. **Keempat**, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. **Kelima** adalah transformasi ekonomi.”

*Presiden Joko Widodo*  
Minggu, 20 Oktober 2019



#BersamaIndonesiaMaju



## RAKORNAS

Indonesia Maju  
Pemerintah Pusat dan Forkopimda  
Tahun 2019



“

Saya pesan ke DPRD dan kepala daerah, jangan terlalu banyak buat Perda, Pergub, Perbub, Perwali. STOP! Jangan membuat peraturan yang memberatkan masyarakat. Akhirnya kita tidak cepat dalam memutuskan terhadap perubahan yang ada. Padahal saat ini kita harus fleksibel, merespon cepat terhadap perubahan.

**Presiden RI**  
**Joko Widodo**



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## DASAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 .

- Peraturan Presiden No 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kemendagri.

# TUGAS BIRO HUKUM KEMENDAGRI



**Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, pelaksanaan pengkajian dan harmonisasi produk hukum dan kebijakan daerah, litigasi dan advokasi hukum, serta dokumentasi dan publikasi hukum.**

# FUNGSI BIRO HUKUM KEMENDAGRI

- a. Perumusan kebijakan umum penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas pokok Kementerian, harmonisasi terhadap pengkajian produk hukum dan kebijakan pemerintahan daerah, pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum, pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum, serta pengundangan produk hukum;
- b. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan di bidang tugas pokok Kementerian;
- c. Perumusan peraturan perundang-undangan antar instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah;
- d. Penyiapan telaahan kebijakan terhadap harmonisasi pengkajian produk hukum dan kebijakan pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah;
- f. **Pelaksanaan koordinasi fasilitasi atau evaluasi produk hukum daerah untuk pemberian nomor register produk hukum daerah;**
- g. **penyiapan bahan pemberian nomor register produk hukum daerah berdasarkan hasil fasilitasi atau evaluasi;**
- h. **pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri; dan**
- i. **penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro**

# APLIKASI JDIH SEBAGAI APLIKASI UMUM SPBE



Nomor : B/ 382 /M.KT.03/2021  
Sifat : Segera  
Hal : Usulan Penetapan Sistem Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum Sebagai Aplikasi Umum SPBE

14 Juni 2021

YTH. BAPAK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DI  
TEMPAT

Dalam Perpres juga diatur mengenai aplikasi SPBE yang digunakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan SPBE, dimana aplikasi terdiri atas aplikasi umum, dan aplikasi khusus. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.

Sementara itu instansi pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, namun harus didasarkan pada arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

4. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka kami usulkan SJDIH dapat menjadi aplikasi umum yang dapat ditetapkan oleh Menteri PANRB di tahun 2021 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi wali layanan SPBE untuk layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sehingga dapat menjadi langkah percepatan transformasi digital nasional berupa terciptanya bagian dari layanan administrasi pemerintahan digital terintegrasi

# APLIKASI UMUM SPBE

## RENCANA PENETAPAN APLIKASI UMUM SPBE



KRISNA

KRISNA  
(KEMENPPN/BAPPENAS)



SIPD  
(KemenDAGRI)



SJDIH  
(Kemenkumham/BPHN)

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DALAM MENDUKUNG  
PEMBINAAN JDIH DI  
PEMERINTAH DAERAH**



## LANDASAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN JDIH

- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Presiden No.33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- PERMENDAGRI No.137 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
- PERMENDAGRI No.2 TH 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemendagri dan Pemda.
- PERMENKUMHAM No 8 Tahun 2019 Tentang Standard Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum



## JDIH PERMENDAGRI NO.2 TAHUN 2014

### Dokumen Hukum

**Dokumen Hukum** adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

### Informasi Hukum

**Informasi Hukum** adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam **Dokumen Hukum**.

# PEMBINAAN & PENGAWASAN



# Pembinaan Kemendagri Dalam Binwas JDIH

1. Rapat Koordinasi Pengelolaan JDIH dengan Peserta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota, yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan Nara Sumber BPHN Kemenkumham sebagai Pembina Tekhnis.
2. Melakukan Monitoring dalam rangka pembinaan secara umum terhadap pengelolaan JDIH di Pemerintah Daerah

# Rencana Kedepan dalam Binwas JDIH di Pemda

1. Akan melaksanakan Revisi Permendagri No 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Mengingat adanya Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan menyesuaikan dengan Khususnya Permenkumham No 8 Tahun 2019 Tentang Standard Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum).
2. Melakukan Rapat Koordinasi Nasional Meliputi Provinsi , Kabupaten dan Kota se Indonesia .
3. Melaksanakan Monev dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Menyipakan Surat Edaran Mendagri kepada Gubenur untuk Memberikan dukungan dan Asistensi dalam Pengelolaan JDIH di Pemerintah daerah

# PRODUK HUKUM TINGKAT DAERAH

- Peraturan Pemerintah Provinsi
- Peraturan Pemerintah Kota
- Peraturan Pemerintah Kabupaten
- Peraturan DPRD Provinsi
- Peraturan DPRD Kota
- Peraturan DPRD Kabupaten
- Peraturan Gubernur
- Peraturan Walikota
- Peraturan Bupati
- Peraturan Desa
- Peraturan Kepala Desa
- Keputusan Gubernur
- Keputusan Walikota
- Keputusan Bupati
- Keputusan Kepala Desa
- Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi
- Keputusan Pimpinan DPRD Kota
- Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
- Instruksi Gubernur
- Instruksi Walikota
- Instruksi Bupati
- Keputusan Rektor
- Keputusan Dekan
- Perjanjian Kerja Sama

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
SERTA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Menteri Dalam Negeri

Memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan  
Gubenur, Rancangan Peraturan Bersama Gubenur atau Rancangan Peraturan  
DPRD Provinsi



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI



KEBIJAKAN DAERAH

NO REGISTRASI PERDA PROVINSI TAHUN  
2021 BERJUMLAH 151 NOREG

NO REGISTRASI PERDA PROVINSI S.D APRIL  
TAHUN 2022 BERJUMLAH 146 NOREG

NO REGISTRASI PERDA PROVINSI S.D  
SEPTEMBER TAHUN 2023 BERJUMLAH 194  
NOREG



# DEREGULASI KEBIJAKAN PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## Target 1

Menurunnya tumpang Tindih dan disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah

## DEREGULASI KEBIJAKAN

Penataan Peraturan Perundang-Undangan melalui  
Penyederhanaan regulasi dan menghapus  
regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat

## Target 2

Meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang kementerian/lembaga/pemerintah daerah

## Target 3

Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/ perizinan/ kemudahan berusaha



KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM QUICK WINS  
SIMPPLIFIKASI DAN DEREGULASI KEBIJAKAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
TAHUN 2021-2022  
(FASILITASI BIRO HUKUM BERSAMA KOMPONEN DILINGKUNGAN KEMENDAGRI)

**SIMPLIFIKASI DAN DEREGULASI**  
**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 2021**

NO	JUDUL PERMENDAGRI	PERMENDAGRI YANG DICABUT
1	<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah</b>	<p>1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Dan Angka Kreditnya</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah</p>

2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencabutan	Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Dan Cianjur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana Prasarana Dan Pelayanan Lintas Batas Pada Pos Lintas Batas Tradisional Dan Pos Lintas Batas Internasional, Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Cuti Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
----	--	---



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI



## b. Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021

No	PMDN/RPMDN	Mencabut	Keterangan
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2012 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI



3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri</li></ol>	dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah provinsi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota

# SIMPLIFIKASI DAN DEREGULASI

## PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 2022

NO	JUDUL PERMENDAGRI	PERMENDAGRI YANG DICABUT
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.	Pasal 26  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen	Pasal 17  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Di Kementerian Dalam Negeri.	Pasal 50  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing NonPemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 402); dan b. Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1245), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri	<p style="text-align: right;"><b>Pasal 78</b></p> <p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2022 Tentang Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat tahun 2022	<p style="text-align: right;"><b>Pasal 26</b></p> <p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9); dan</li> <li>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 990), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> </ul>
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> </ul>



SEKIAN  
TERIMA KASIH